

Submitted 20 Mei 2020

Accepted 18 Juni 2019

EVALUASI PENGELOLAAN DESA WISATA KABA-KABA, KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN

I Wayan Pantiyasa

Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional

E-mail: pantiyasa36@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Potensi daya tarik wisata yang dimiliki desa Kaba-kaba, kondisi Pengelolaan desa wisata Kaba-kaba dilihat dari Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, Pengawasan dan katagori Desa Wisata Kaba-kaba jika dievaluasi berdasarkan ketentuan kementerian Pariwisata tentang klasifikasi Desa wisata. Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi , wawancara dengan para pemangku kepentingan pengembangan desa wisata Kaba-Kaba dan dokumentasi.Data yang dikumpulkan dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Desa kaba-kaba memiliki memiliki potensi daya tarik wisata dari alamberupa lahan pertanian, sumberair, dari budaya berupa peninggalan kerajan kaba-Kaba, aktivitas sosial masyarakat seperti bertani, pande besi dan upacara adat dan keagamaan.Pengelolaan Desa wisata belum berjalan maksimal walaupun telah terbentuk Kelompok Sadar wisata, perencanaan belum ada ,aktivitas pengelolaan masih dibawah kendali satu orang, pengawasan belum berjalan maksimal, partisipasi masyarakat belum optimal,Katagori desawisata Kaba-Kaba adalah masih kata gori Desa wisata perintisan

Kata Kunci: *Evaluasi Desa wisata, Pengelolaan Desa wisata, Daya Tarik wisata, Desa wisata Rintisan*

ABSTRACT

This study aims to determine the potential of the tourist attraction owned by the Kaba-kaba village, the condition of the management of the Kaba-kaba tourism village seen from the Planning, Organizing, Direction, Supervision and category of the Kaba-kaba Tourism Village if evaluated based on the provisions of the Ministry of Tourism regarding the classification of the Tourism Village. Data collection methods were carried out by observation, interviews with stakeholders in the development of the Kaba-Kaba tourism village and documentation. The data collected were analyzed with qualitative descriptive analysis. The results showed that the village of kaba-kaba has the potential of a tourist attraction from alamberupa agricultural land, water sources, from culture in the form of kaba-Kaba heritage, community social activities such as farming, iron pande and traditional and religious ceremonies. Management of tourism village has not run optimally although tourism awareness groups have been formed, planning is not yet available, management activities are still under the control of one person, supervision has not been running optimally, community participation is not yet optimal, the Kaba-Kaba desawisata category is still a word gori Pioneer tourism village

Keywords: *Evaluation of Tourism Village, Tourism Village Management, Tourist Attraction, pioneer Tourism Village*

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor yang telah menjadi sektor tercepat dalam perkembangannya sebagai salah satu aktivitas ekonomi dunia lebih dari enam dekade, hal ini dikemukakan Brunner (2010) yang menyatakan : *Over the past six decades, tourism has been one of the world economy's fastest growing sectors.* United Nations World Tourism Organization (UNWTO) mengakui bahwa sektor Pariwisata adalah sektor unggulan (tourism is leading sector) dan merupakan salah satu kunci penting untuk pembangunan wilayah di suatu negara dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Sektor pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan melalui pengembangan pariwisata kerakyatan. Untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis kerakyatan, diperlukan upaya diversifikasi daya tarik wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya, dan pembangunan kepariwisataan yang ramah lingkungan. Pengembangan wisata seperti ini kini dikenal juga dengan istilah 'pariwisata pro-rakyat' (Putra dan Pitana, 2010). Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat semakin dianggap sebagai alternatif pariwisata yang berkelanjutan, karena menekankan keterlibatan aktif masyarakat setempat dan kontrol mereka terhadap pengembangan pariwisata, Community-based tourism (CBT) is increasingly considered as more sustainable, as it emphasizes the active involvement of the local community and their control of tourism development (Marinovski, 2016), pendapat lain menyebutkan bahwa community based tourism (CBT) adalah pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya. CBT merupakan alat bagi pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan atau dengan kata lain CBT merupakan alat bagi pembangunan pariwisata berkelanjutan (Suansri, 2003). Salah satu representasi dari pembangunan Pariwisata berbasis Masyarakat adalah pengembangan Desa Wisata. Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Nuryanti, Wiendu, 1993). Desa wisata juga merupakan bentuk ekowisata (eco-tourism). Ekowisata merupakan suatu bentuk perjalanan wisata yang bertanggung jawab ke area-area alami yang dilakukan dengan tujuan konservasi lingkungan serta melestarikan kehidupan dan mensejahterakan penduduk setempat, Ekowisata merupakan sebuah aktivitas yang ramah lingkungan dan sanggup mendukung konservasi keanekaragaman hayati (Li, 2006 dalam Baksh, dkk., 2012).

Pengembangan ekowisata adalah dengan memanfaatkan hubungan yang saling menguntungkan antara desa dan kota, konsep eco village bisa menjadi solusi dalam pengembangan pariwisata kedepan. Menurut GEN (2000) dalam Shodiq (2009), Eco village adalah konsep tata ruang dan wilayah yang memperhatikan kualitas penduduk dan kualitas ekologis secara holistik karena melibatkan semua dimensi kehidupan makhluk hidup. Eco village merupakan pembangunan kawasan, masyarakat serta kualitas lingkungan alam yang berkelanjutan. Pengembangan Desa Wisata pada saat ini terus didorong oleh Pemerintah melalui Program yang digulirkan dalam kegiatan Pariwisata di pedesaan dengan mengembangkan desa wisata sebagai program yang mampu mempercepat pertumbuhan baik ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Program Percepatan Pengembangan desa wisata pun dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata bersinergi dengan

Kementrian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi untuk mewujudkan 2000 desa wisata. Kabupaten Tabanan telah mengembangkan desa wisata salah satunya adalah Desa wisata Kaba-kaba. Desa Kaba-kaba menjadi desa wisata berdasarkan Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/329/03/HK & HAM /2016. Penetapan Desa Kaba-Kaba menjadi Desa Wisata didasarkan atas potensi daya tarik wisata yang dimiliki, demikian pula Kelompok sadar wisata telah dibentuk, akan tetapi perkembangan perjalanannya sampai saat ini belum berjalan seperti yang diharapkan, bahkan beberapa masyarakat yang ditemui belum tahu tentang desanya dikembangkan menjadi desa wisata. Dari hasil wawancara dengan Kelompok Sadar wisata menyatakan beberapa wisatawan asing yang berkunjung ke desa wisata kaba-kaba atas kerjasama dengan perusahaan tour yang menyediakan jasa bersepeda, dimana peran Kelompok Sadar wisata belum terorganisir hanya ditangani oleh Ketua POKDARWIS saja yang kebetulan memiliki hubungan personal dengan perusahaan penyedia paket bersepeda tersebut. Jadi kelompok Sadar wisata dapat dikatakan belum dapat berperan maksimal. dengan pradigma ini peneliti tertarik mengadakan evaluasi Pengelolaan Desa Wisata Kaba-Kaba.

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan masalah adalah 1) Apa Potensi daya tarik wisata yang dimiliki desa Kaba-kaba, 2) Bagaimana Pengelolaan desa wisata Kaba-kaba dilihat dari Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan dan Pengawasan desa wisata, 3) Apakah katagori Desa Wisata Kaba-kaba jika dievaluasi berdasarkan ketentuan kementrian Pariwisata tentang klasifikasi Desa wisata

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat sebagai pendukung dan penghambat pengembangan desa wisata serta mengevaluasi katagori desa wisata kaba-kaba, dengan demikian penelitian ini penting peranannya bagi kelompok sadar wisata menyusun strategi pengembangan desa wisata demikian pula bagi pemangku kepentingan lainnya seperti perguruan Tinggi sebagai dasar melakukan Program Pengabdian kepada Masyarakat, Pemerintah khususnya dinas pariwisata daerah Tabanan lebih mudah melakukan pembinaan

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Desa Wisata

Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Nuryanti, 1993). Menurut Cooper dkk (1993) menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) komponen yang harus dimiliki oleh sebuah daya tarik wisata yaitu Attraction (Atraksi), Accessibilities (Aksesibilitas), Amenities (Amenitas atau fasilitas), dan Ancillary services (jasa pendukung pariwisata). Desa wisata juga merupakan bentuk eko wisata (eco-tourism). Ekowisata merupakan suatu bentuk perjalanan wisata yang bertanggung jawab ke area-area alami yang dilakukan dengan tujuan konservasi lingkungan serta melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Ekowisata merupakan sebuah aktivitas yang ramah lingkungan dan sanggup mendukung konservasi keanekaragaman hayati (Li, 2006 dalam Baksh, dkk., 2012). Menurut GEN (2000 dalam Shodiq (2009), *eco village* adalah konsep tata

ruang dan wilayah yang memperhatikan kualitas penduduk dan kualitas ekologis secara holistik karena melibatkan semua dimensi kehidupan makhluk hidup. Nurlaelih dalam Astrini (2013) menyatakan eco village merupakan konsep kampung berbasis lingkungan yang dapat mengatasi permasalahan lingkungan perkotaan pada saat ini.

B. Komponen utama pengembangan Desa Wisata

Menurut Cooper dkk (1993) menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) komponen yang harus dimiliki oleh sebuah daya tarik wisata yaitu *Attraction* (Atraksi), *Accessibilities* (Aksesibilitas), *Amenities* (Amenitas atau fasilitas), dan *Ancillary services* (jasa pendukung pariwisata). Menurut Yoeti (2002) bahwa keberhasilan suatu kawasan wisata sangat tergantung pada 3A yaitu *Attraction* (Atraksi), *Accessibilities* (Aksesibilitas), *Amenities* (Amenitas atau fasilitas). Sedangkan menurut Madiun (2008) menyebutkan bahwa satu komponen tambahan yang menjadi inti dari pengembangan pariwisata itu sendiri yaitu *Community Involvement* (Keterlibatan Masyarakat).

Edward Inskeep, Dalam Pantiyasa: 2019) dalam *Tourism Planning An Integrated and Sustainable Development Approach*, memberikan definisi: *Village Tourism, where small groups of tourist stay in or near traditional, often remote villages and learn about village life and the local environment*. Inskeep: Wisata pedesaan dimana sekelompok kecil wisatawan tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional, sering di desa-desa yang terpencil dan belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat. Komponen pendukung dalam pengembangan desa wisata seperti dalam gambar berikut ini

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa komponen pengembangan desa wisata terdiri dari:

1) *Attraction* (Atraksi)

Merupakan komponen yang signifikan dalam menarik wisatawan. *Attraction*, adalah potensi utamasebuah desa wisata. Atraksi berkaitan dengan *what to see dan what to do*. Apa yang bisa dilihat dan dilakukan oleh wisatawan di desawisata tersebut. Untuk menemukan potensi kepariwisataan di suatu desa orang harus berpedoman kepada apa yang dicari oleh wisatawan. Modal atraksi yang menarik kedatangan wisatawan itu ada tiga, yaitu 1) Natural Resources (alami), 2) Atraksi wisata budaya, dan 3) Atraksi buatan manusia itu sendiri. Potensi wisata ini dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata di desa wisata. Atraksi wisata dapat dikembangkan sehingga dapat menahan wisatawan selama berhari-hari dapat berkali-kali dinikmati, atau bahkan pada kesempatan lain wisatawan bisa berkunjung ke tempat yang sama. Keberadaan atraksi menjadi alasan serta motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu desa wisata. Atraksi bisa berupa keindahan dan keunikan alam, budaya masyarakat setempat, peninggalan bangunan bersejarah, serta atraksi buatan seperti sarana permainan dan hiburan. Seharusnya sebuah atraksi harus mempunyai nilai diferensiasi yang tinggi, unik dan berbeda dari desa lainnya. Berbagai macam atraksi yang mungkin untuk dikembangkan di suatu desa wisata meliputi: (1) kegiatan persawah/ladangan, (2) kegiatan kesenian desa (3) kegiatan olahraga dengan masyarakat desa, (4) kegiatan upacara, (5) kegiatan meditasi lainnya (6) kegiatan pembangunan rumah, (7) kegiatan desa adat lainnya, (8) makanan dan minuman

2) *Amenities* (Amenitas atau fasilitas)

Amenity, adalah segala fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di desa Wisata. Amenitas berkaitan dengan ketersediaan sarana akomodasi untuk menginap serta restoran atau warung untuk makan dan minum di suatu desa wisata. Kebutuhan lain yang mungkin juga diinginkan dan diperlukan oleh wisatawan, seperti : akomodasi, toilet umum, *restarea*, tempat parkir, klinik kesehatan, dan sarana ibadah sebaiknya juga tersedia di sebuah desa wisata. Tentunya fasilitas-fasilitas tersebut juga perlu melihat dan mengkaji situasi dan kondisi dari desa wisata sendiri dan kebutuhan wisatawan. Tidak semua amenitas harus berdekatan dan berada di suatu desa wisata. Destinasi alam dan peninggalan bersejarah sebaiknya agak berjauhan dari amenitas yang bersifat komersial, seperti hotel, restoran dan *restarea*.

Salah satu media interaksi yang paling efektif dan total antara wisatawan dan masyarakat pedesaan adalah apabila wisatawan dimungkinkan tinggal di desa. Beberapa cara yang mungkin bisa ditempuh adalah: Akomodasi yang disiapkan untuk wisatawan hendaknya tetap bernuansa pedesaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara merehabilitasi dan sedikit modifikasi terhadap rumah penduduk yang sudah ada, sehingga memenuhi standar minimal akomodasi dilihat dari segi kesehatan dan kenyamanan, meliputi sirkulasi udara, penyaluran, sanitasi dan penyediaan sarana MCK. Akomodasi merupakan bagian baru di lingkungan rumah-rumah pedesaan, dengan bangunan yang berdiri di lahan milik penduduk lokal. Pengelolaan dari penyelenggaraan tempat tinggal seperti itu sepenuhnya ada di tangan penduduk lokal. Beberapa program persiapan sebaiknya difasilitasi secara matang sebelumnya. Program persiapan tersebut meliputi penyuluhan, pelatihan pengelolaan/manajemen sederhana dan sebagainya. Bentuk akomodasi yang dianggap tepat di desa wisata adalah *Home stay*, pondok wisata.

2) Accessibility (Aksesibilitas)

Accessibility merupakan hal yang paling penting dalam pengembangan desa wisata. *Accessibility*, adalah sarana dan infrastruktur untuk menuju ke desa wisata. Akses jalan raya, ketersediaan sarana transportasi dan rambu-rambu penunjuk jalan merupakan aspek penting bagi sebuah destinasi desa wisata. Banyak sekali wilayah di Indonesia yang mempunyai keindahan alam dan budaya yang layak untuk dijual kepada wisatawan, tetapi tidak mempunyai aksesibilitas yang baik, sehingga ketika diperkenalkan dan dijual, tak banyak wisatawan yang tertarik untuk mengunjunginya. Perlu juga diperhatikan bahwa akses jalan yang baik saja tidak cukup tanpa diiringi dengan ketersediaan sarana transportasi. Bagi *individual tourist*, transportasi umum sangat penting karena kebanyakan mereka mengatur perjalanannya sendiri tanpa bantuan *travel agent*, sehingga sangat bergantung kepada sarana dan fasilitas publik.

4) Ancillary services

Pelayanan tambahan seperti Tourist Information, Travel Agent dan stakeholder yang berperan dalam kepariwisataan

5) Kelembagaan dan Community Involvement (peran serta masyarakat)

Baiquni (2005) menyatakan bahwa satu hal penting dalam pengembangan desa wisata adalah persoalan kapasitas kelembagaan pengelola desa wisata. Pendekatan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan lokal (pemerintah daerah dan masyarakat) memiliki spektrum konsep dan pendekatan yang bervariasi. Ada lima aspek dan pendekatan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan suatu desa wisata, yaitu *holistic approach*, *participatory learning*, *empowerment of*

management, actionresearch, dan synergyandnetwork, yang masing-masing aspek tersebut dijelaskan seperti berikut.

- 1) *Holisticapproach*. Pendekatan ini melihat secara menyeluruh dimensi pembangunan atau secara holistik. Pendekatan ini berupaya mengintegrasikan berbagai elemen atau sektor pembangunan secara terpadu, sehingga perumusan masalah dan pemecahannya diselenggarakan secara kolektif dan partisipatif. Metode yang digunakan adalah *system thinking* sebagai cara untuk membuka pemahaman dan melakukan inovasi dalam merumuskan konteks kebijakan dan pengembangan yang tepat guna.
- 2) *Participatorylearning*. Pendampingan dalam pengembangan kapasitas kelembagaan lokal perlu dilakukan secara partisipatif, menggali bersama kebutuhan dan merumuskan prioritas penanganan dalam proses ‘belajar bersama’. Sesungguhnya yang paling tahu persoalan adalah pelaku lokal (masyarakat dan pemerintah daerah) Peran konsultan pada penguatan proses memfasilitasi pembelajaran kolektif, sehingga pemahaman permasalahan akan lebih baik dan solusinya dapat dikerjakan bersama-samasesuai fungsi masing-masing lembaga dalam tata manajemen. Metode pembelajaran partisipatif yang dapat digunakan adalah *saresehan, lokakarya dan belajar sambil bekerja (learningbydoing)*.
- 3) *Empowermentof management*. Proses pembelajaran partisipatif mencakup individual dan institusional. Dalam proses belajar akan menimbulkan pencerahan (*enlightment*) dan penguatan atau pemberdayaan (*empowerment*). Kelembagaan yang kuat terdiri dari para pelakunya yang juga tercerahkan dalam belajar dan bekerja. Manajemen kelembagaan yang terus membangun pencerahan dan pemberdayaan akan memberikan perbaikan kinerja dalam pengembangan desa wisata.
- 4) *Sinergyandnetwork*. Pendekatan yang penting dalam peningkatan kapasitas kelembagaan adalah kesediaan untuk membuka jaringan dan bekerja secara jejaring dengan segenap komponen kelembagaan, baik yang ada dilingkungan pemerintah eksekutif, legislatif dan yudikatif, maupun kelembagaan masyarakat dan bisnis. Sinergi dan jejaring merupakan upaya untuk mewujudkan tugas dan menjawab tantangan pembangunan secara bersama, menciptakan keseimbangan *checkandbalance*, dan membangun *trust* diantara pelaku pembangunan desa wisata.

Orientasi pengembangan desa wisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Upaya ini perlu kesabaran dalam melakukan pengkajian, perencanaan, pengembangan dan pemanfaatan secara wajar dan adil, baik terhadap alam maupun manusianya. Tidak hanya manusia yang memiliki hak, juga alam lingkungan memiliki hak yang harus dan wajib ditunaikan oleh manusia yang memanfaatkannya. Optimalisasi daya dukung memerlukan pemahaman yang baik mengenai karakter, dinamika dan kecenderungan yang berkembang. Ini perlu dicermati dan diikuti, sehingga perkembangan itu mengarah pada kelestarian, bukan kerusakan.

C. Manajemen Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism)

Manajemen pariwisata adalah suatu tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya dalam bidang pariwisata.

Manajemen pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas dan nilai social yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisata serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas local. Menurut Murphy (1988), Larry D, Peter F, Wayne D (2010) dalam Sunaryo (2013) menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan harus merupakan suatu kegiatan yang berbasis pada komunitas, dengan faktor utama bahwa sumber daya dan keunikan komunitas local baik berupa elemen fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya) yang melekat pada komunitas tersebut harus menjaga pergerakan utama dalam pariwisata. Sunaryo (2013) juga menambahkan bahwa untuk mewujudkan pengembangan pariwisata berjalan dengan baik dan dikelola dengan baik maka hal yang paling mendasar dilakukan adalah bagaimana memfasilitasi keterlibatan yang luas dari komunitas lokal dalam proses pengembangan dan memaksimalkan nilai manfaat sosial dan ekonomi dari kegiatan pariwisata untuk masyarakat setempat. Masyarakat lokal memiliki kedudukan yang sama pentingnya sebagai salah satu pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pembangunan kepariwisataan, selain pihak pemerintah dan industri swasta. Adimihardja (1999) dalam Sunaryo (2013) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses yang tidak saja hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat yang sedang tidak berdaya, namun demikian juga harus berupaya dapat meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Dalam pembangunan kepariwisataan yang berbasis pada masyarakat menurut Suansri (2003) dalam Rahayu dkk (2015:18) menyebutkan prinsip dari Community-Based Tourism yang harus dilakukan, yaitu: 1) mengenali, mendukung, dan mempromosikan kepemilikan masyarakat dalam pariwisata; 2) melibatkan anggota masyarakat dari setiap tahap pengembangan pariwisata dalam berbagai aspeknya, 3) mempromosikan kebanggaan terhadap komunitas bersangkutan; 4) meningkatkan kualitas kehidupan; 5) menjamin keberlanjutan lingkungan; 6) melindungi ciri khas (keunikan) dan budaya masyarakat lokal; 7) mengembangkan pembelajaran lintas budaya; 8) menghormati perbedaan budaya dan martabat manusia; 9) mendistribusikan keuntungan dan manfaat yang diperoleh secara proporsional kepada anggota masyarakat; 10) memberikan kontribusi dengan persentase tertentu dari pendapatan yang diperoleh untuk pengembangan masyarakat; dan 11) menonjolkan keaslian hubungan masyarakat dengan lingkungannya. Community Based Tourism dan Desa Wisata

Masyarakat saat ini seharusnya mampu mendapatkan keuntungan lebih banyak dari pariwisata di wilayahnya. Pariwisata berbasis komunitas (community based tourism) adalah sebuah konsep yang menekankan masyarakat untuk mampu mengelola dan mengembangkan objek wisata oleh mereka sendiri.

Definisi CBT yaitu:

1) bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata, 2) masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-usaha pariwisata juga mendapat keuntungan, 3) menuntut pemberdayaan secara politis dan demokratisasi dan distribusi keuntungan kepada komunitas yang kurang beruntung di pedesaan. (Garrod 2001:4)

Selain yang dikemukakan oleh Garrod, dalam pandangan Hausler CBT merupakan suatu pendekatan pembangunan pariwisata yang menekankan pada masyarakat

lokal (baik yang terlibat langsung dalam industri pariwisata maupun tidak) dalam bentuk memberikan kesempatan (akses) dalam manajemen dan pembangunan pariwisata yang berujung pada pemberdayaan politis melalui kehidupan yang lebih demokratis, termasuk dalam pembagian keuntungan dari kegiatan pariwisata yang lebih adil bagi masyarakat lokal.

Hausler menyampaikan gagasan tersebut sebagai wujud perhatian yang kritis pada pembangunan pariwisata yang seringkali mengabaikan hak masyarakat lokal di daerah tujuan wisata. Suansri (2003:14) mendefinisikan CBT sebagai wujud perhatian yang kritis pada pembangunan pariwisata yang seringkali mengabaikan hak masyarakat lokal di daerah tujuan wisata. Suansri (2003:14) mendefinisikan CBT sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya. CBT merupakan alat pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan, atau dengan kata lain CBT merupakan alat untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Ciri-ciri khusus dari Community Based Tourism menurut Hudson (Timothy, 1999:373) adalah berkaitan dengan manfaat yang diperoleh dan adanya upaya perencanaan pendampingan yang membela masyarakat lokal serta lain kelompok memiliki ketertarikan/minat, yang memberi kontrol lebih besar dalam proses sosial untuk mewujudkan kesejahteraan. Sedangkan Murphy (1985:153) menekankan strategi yang terfokus pada identifikasi tujuan masyarakat tuan rumah dan keinginan serta kemampuan mereka menyerap manfaat pariwisata. Menurut Murphy setiap masyarakat harus didorong untuk mengidentifikasi tujuannya sendiri dan mengarahkan pariwisata untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat lokal. Untuk itu dibutuhkan perencanaan sedemikian rupa sehingga aspek sosial dan lingkungan masuk dalam perencanaan dan industri pariwisata memperhatikan wisatawan dan juga masyarakat setempat.

Wujud dari konsep community based tourism adalah dikembangkannya desa-desa wisata, dimana dalam desa wisata, masyarakat desa yang berada di wilayah pariwisata mengembangkan potensinya baik potensi sumber daya alam, budaya, dan juga potensi sumber daya manusianya (masyarakat setempat). Keberadaan desa wisata di Indonesia saat ini sudah semakin berkembang pesat. Hanya dalam kurun waktu tiga tahun, jumlah kunjungan ke desa wisata bertambah lima kali lipat. Mengacu data Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, saat ini di Indonesia terdapat 987 desa wisata. Jumlahnya semakin meningkat sejak pertama diselenggarakannya desa wisata pada tahun.

Pengembangan desa wisata dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat desa itu sendiri, diantaranya adalah akan adanya lahan pekerjaan baru bagi masyarakat sehingga dapat menurunkan angka pengangguran di desa tersebut, selain itu desa wisata yang mengusung konsep ekowisata akan membuat suatu desa dapat mempertahankan kelestarian alam dan budaya desanya. Hal lainnya adalah, desa wisata dapat membuat suatu desa menjadi desa yang mandiri karena dapat menyediakan alternatif pekerjaan yang dapat dimasuki oleh masyarakat setempat. Desa wisata saat ini memiliki kecenderungan menggunakan konsep ekowisata, dimana pariwisata yang ditawarkan adalah segala potensi yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan. Pariwisata pedesaan menjadikan masyarakat lebih menjaga keaslian budaya dan alam di desanya untuk dapat mempertahankan minat wisatawan dalam berwisata di desa wisata. Konsep yang digunakan dalam CBT sangat erat kaitannya dengan pemberdayaan, dimana masyarakat diberdayakan

terlebih dahulu agar mampu mengembangkan potensinya sendiri, dengan pemberdayaan masyarakat dilatih untuk bisa menolong dirinya sendiri (self help), sehingga, pada pembangunan desa wisata, masyarakat dikembangkan dan diberdayakan untuk mampu mengelola desa wisatanya sendiri.

D. Pendekatan Pengembangan Desa Wisata

Berdasar dari penelitian dan studi-studi dari UNDP/WTO dan beberapa konsultan Indonesia, dicapai dua pendekatan dalam menyusun rangka kerja/konsep kerja dari pengembangan sebuah desa menjadi desa wisata, yaitu melalui pendekatan pasar dan pendekatan fisik. Pertama, Pendekatan Pasar untuk Pengembangan Desa Wisata antara lain sebagai berikut ; (1) Interaksi tidak langsung adalah Model pengembangan didekati dengan cara bahwa desa mendapat manfaat tanpa interaksi langsung dengan wisatawan. (2) Interaksi setengah langsung adalah Bentuk-bentuk one day trip yang dilakukan oleh wisatawan, kegiatan-kegiatan meliputi makan dan berkegiatan bersama penduduk. (3) Interaksi Langsung Wisatawan dimungkinkan untuk tinggal/bermalam dalam akomodasi yang dimiliki oleh desa tersebut. Pada Pendekatan Pasar ini diperlukan beberapa kriteria yaitu : (a) Atraksi wisata; Jarak Tempuh; (b) Besaran Desa; (c) Sistem Kepercayaan dan kemasyarakatan; (d) Ketersediaan infrastruktur.

Kedua, Pendekatan Fisik Pengembangan Desa Wisata dimana pendekatan ini merupakan solusi yang umum dalam mengembangkan sebuah desa melalui sektor pariwisata dengan menggunakan standar-standar khusus dalam mengontrol perkembangan dan menerapkan aktivitas konservasi.

E. Persyaratan Desa Wisata

Merujuk kepada definisi desa wisata, desa-desa yang bisa dikembangkan dalam program desa wisata akan memberikan contoh yang baik bagi desa lainnya, penetapan suatu desa dijadikan sebagai desa wisata harus memenuhi persyaratan-persyaratan, antara lain sebagai berikut:

- a. Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.
- b. Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan local, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata.
- c. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya
- d. Keamanan di desa tersebut terjamin.
- e. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai.
- f. Beriklim sejuk atau dingin
- g. Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

F. Klasifikasi Desa Wisata

Kementrian Pariwisata mengadakan pembinaan dan pendampingan terhadap desa wisata. Dalam melakukan pendampingan dilakukan Klasifikasi desa wisata seperti tabel 2.1

Tabel 2.1 Klasifikasi Desa Wisata

| NO | KRETERIA | SUB KRETERIA | KLASIFIKASI DESA WISATA | | | |
|----|--|---|-------------------------|---|---|---|
| | | | A | B | C | D |
| 1 | Kepemilikan dan Kepengurusan Oleh Masyarakat | Terdapat pengelolaan yang efektif dan transparan | √ | √ | √ | √ |
| | | Legalitas lembaga atau kelompok desa | √ | √ | √ | √ |
| | | Memiliki pengelolaan yang efektif dan transparan | - | - | - | √ |
| | | Memiliki kemitraan yang efektif | √ | √ | √ | √ |
| 2 | Kontribusi Terhadap Kesejahteraan Sosial | Menjaga martabat manusia | √ | √ | √ | √ |
| | | Pembagian biaya dan keuntungan yang adil | - | √ | √ | √ |
| | | Memiliki jaringan ke ekonomi lokal dan regional | - | - | √ | √ |
| | | Melestarikan dan memperkaya tradisi dan budaya setempat | √ | √ | √ | √ |
| | | Menjaga martabat manusia | √ | √ | √ | √ |
| 3 | Kontribusi Untuk Menjaga dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan | Melestarikan SDA | √ | √ | √ | √ |
| | | Aktivitas konservasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan | - | √ | √ | √ |
| 4 | Mendorong Terjadinya Partisipasi Interaktif Antara Masyarakat Lokal dan Pengunjung (wisatawan) | Terdapat interaksi antara tamu dan masyarakat local | √ | √ | √ | √ |
| | | Keberlanjutan produk pariwisata berbasis masyarakat | √ | √ | √ | √ |
| 5 | Jasa Perjalanan Wisata dan Pramuwisata yang Berkualitas | Kualitas keahlian pramuwisata desa wisata | - | - | √ | √ |
| | | Memastikan kualitas perjalanan wisata | - | - | - | √ |
| 6 | Kualitas Makanan dan Minuman | Kualitas pelayanan makanan dan minuman | √ | √ | √ | √ |
| | | Memastikan makanan dan minuman yang berkualitas | √ | √ | √ | √ |
| 7 | Kualitas Akomodasi (homestay) | Kualitas layanan akomodasi | - | √ | √ | √ |
| | | Memastikan pengelolaan akomodasi yang berkualitas | - | - | √ | √ |
| 8 | Kinerja Friendly Tour Operator | Komitmen pada nilai-nilai ideal desa wisata | √ | √ | √ | √ |
| | | Komitmen pada nilai-nilai ideal desa wisata | - | √ | √ | √ |
| | | Kontribusi terhadap perlindungan masyarakat dan alam | - | - | √ | √ |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|
| | | Dukungan terhadap ekonomi local | √ | √ | √ | √ |
| | | Mempromosikan pengalaman yang memuaskan dan aman bagi wisatawan dan masyarakat | √ | √ | √ | √ |

Sumber: Asdep Pengembangan SDM Pariwisata dan Hubungan antar Lembaga Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan (2019)

METODE PENELITIAN

A. Tempat Penelitian

Desa Wisata Kaba-Kaba adalah salah satu desa yang ditetapkan menjadi desa wisata yang berada di Kabupaten Tabanan, Desa Wisata Kaba-Kaba ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Tabanan. Secara geografis, Desa Wisata Kaba-Kaba termasuk di dalam wilayah Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.

B. Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah Kepala Desa kaba-Kaba dan jajaran terkait, pengurus kelompok Sadar Wisata, Kepala Lingkungan dan 10 orang anggota masyarakat

C. Jenis dan Sumber data

1) Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data kualitatif yaitu data berupa keterangan atau informasi yang didapat dari informan tentang faktor internal dan eksternal sebagai penghambat dan pendukung pengembangan desa wisata kaba-kaba

2) Sumber data

- a) Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (Pantiyasa : 2013) yaitu melalui pemangku kepentingan pengembangan desa wisata Kaba-Kaba serta hasil pengamatan langsung tentang pengelolaan desa wisata Kaba-Kaba
- b) Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya, contohnya dari Badan Pusat Statistik, Dinas Pariwisata setempat, website internet, makalah ataupun penelitian-penelitian yang sudah pernah dibuat sebelumnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

- a) Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan Kepala desa Kaba-Kaba, Pengurus Kelompok sadar wisata
- b) Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap atraksi wisata dan kondisi desa wisata kaba-kaba
- c) Cheklist yaitu memberikan form check list kepada pengelola desa wisata untuk melakukan penilaian mandiri terhadap katagori desa wisata untuk dapat dibandingkan dengan penilaian peneliti
- d) Dokumentasi yaitu melakukan studi dokumentasi dari dokumen dokumen pengelolaan desa wisata kaba-kaba

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan yang diperoleh, disusun secara sistematis kemudian ditarik simpulan (Pantiyasa, 2013) Data yang diperoleh direduksi, kemudian dideskripsikan, dan disimpulkan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Potensi daya tarik desa wisata Kaba-kaba

- 1) atraksi wisata Budaya
 - a) Puri gede Kaba-kaba ,

Puri Gede Kaba-Kabamerupakan peninggalan dari keturunan Arya Belog dari Kerajaan Maja pahit.Arya Belog mendirikan kerajaan Kaba-Kaba, beristana di sebelah selatan Bale Agung, sebelah timur jalan. Wilayah kekuasaannya meliputi: sebelah utara sampai batas wilayah Tabanan, sebelah timur sungai Busak, sebelah selatan sampai laut, sebelah barat desa Pangragoan. Beliau memerintah hingga tiga keturunan. Pada keturunan keempat, keturunan Arya Belog telah digantikan oleh putra Raja Dalem. Raja keempat ini kemudian mendirikan puri dan melakukan beberapa pembaharuan di bidang arsitektur Puri yang meliputi kori agung dan merajan Agung yang didirikan pada abad ke 16. Beberapa generasi kemudian, terdapat keturunan beliau yang memerintah di Kaba-Kaba selama satu periode dan menciptakan Puri Kaleran. (*wawancara dengan ketua puri A.A Ngurah Anom Mayun, 2019*).Dilingkungan puri terdapat pura antara lain

- Pura (Merajan Puri)

Merajan adalah Pura atau tempat suci yang paling kecil yang dikelola oleh satu keluarga. Seperti yang telah diketahui Pura adalah istilah untuk tempat ibadah agama Hindu Bali di Indonesia. Ada tiga golongan Pura di Bali yaitu Sanggah (Pamerajan), Pura Desa (Kahyangan tiga) dan Pura Kerajaan (Soekmono, 2005). Puri Gede Kaba-Kaba memiliki 4 merajan yaitu Merajan Agung, Merajan Ayun, Merajan Kaleran dan Merajan Penyepian.

- a. Merajan Agung

Gambar 4.3

Merajan Agung Puri Gede Kaba-Kaba



Sumber: Dokumentasi Pribadi (2019)

Merajan Agung adalah tempat didirikan bangunan-bangunan suci untuk memuliakan leluhur. Biasanya Merajan Agung terletak di wilayah timur laut (kaja kangin). Merajan Agung juga berkaitan dengan upacara Pitra Yadnya. Merajan Agung di Puri Gede Kaba-Kaba memiliki 19 pelinggih yaitu 1 Pelinggih yang dibuat untuk memuja raja pertama, 3 Pelinggih untuk memuja Dewa Sрати (Dewa untuk membuat banten), Pelinggih Bhatara Gusti, Pelinggih Bhatara Anggara Kasih, Pelinggih Menjang Sluang, Pelinggih Rong Telu (memuja leluhur), Pelinggih Rambut Sedana, Pelinggih Simpangan Bhatara di Danau Batur, Pelinggih Simpangan Bhatara di Besakih, Pelinggih Simpangan Batu Karu, Pelinggih Pesaren, Pelinggih Purusa, Pelinggih Pradana, Pelinggih Ratu Meres, Pelinggih Ratu Mujung, Pelinggih Taksu Agung, Piyasan, Bale Pewedan, Gedong Penyimpanan.

b. Merajan Ayun

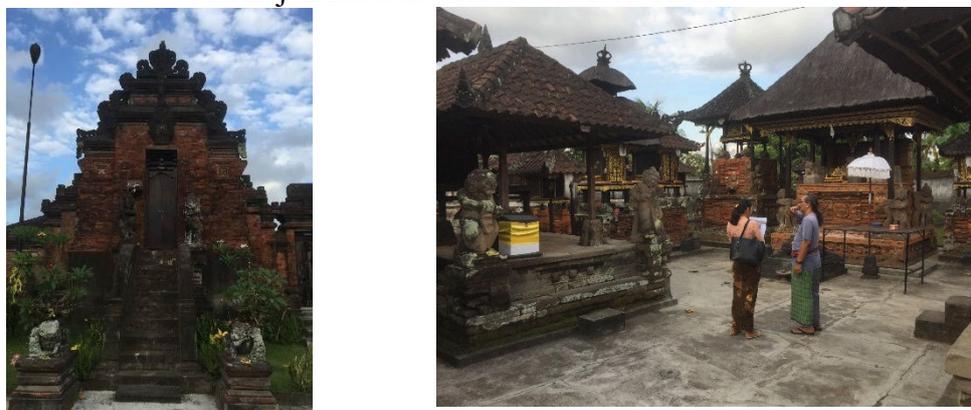


Gambar 4.4
Merajan Ayun Puri Gede Kaba-Kaba
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2019)

Merajan Ayun yang berada di Puri Gede Kaba-Kaba berfungsi sebagai pelaksanaan upacara Manusia Yadnya seperti Potong gigi (Mesangih) dan upacara perkawinan (Pawiwahan).

c. Merajan Kaleran

Gambar 4.5
Merajan Kaleran Puri Gede Kaba-Kaba



Sumber: Dokumentasi Pribadi (2019)

Merajan Kaleran merupakan pura bagi raja dan keluarganya. Bangunan Merajan Kaleran dipengaruhi oleh Majapahit yang berupa gapura berbentuk candi bentar, arca penjaga berbentuk Rangda. Selain itu terdapat arca kura-kura yang berada di halaman jeroan Merajan Kaleran. Di Merajan Kaleran juga terdapat kolam yang agak luas dan ikan.

d. Merajan Penyepian

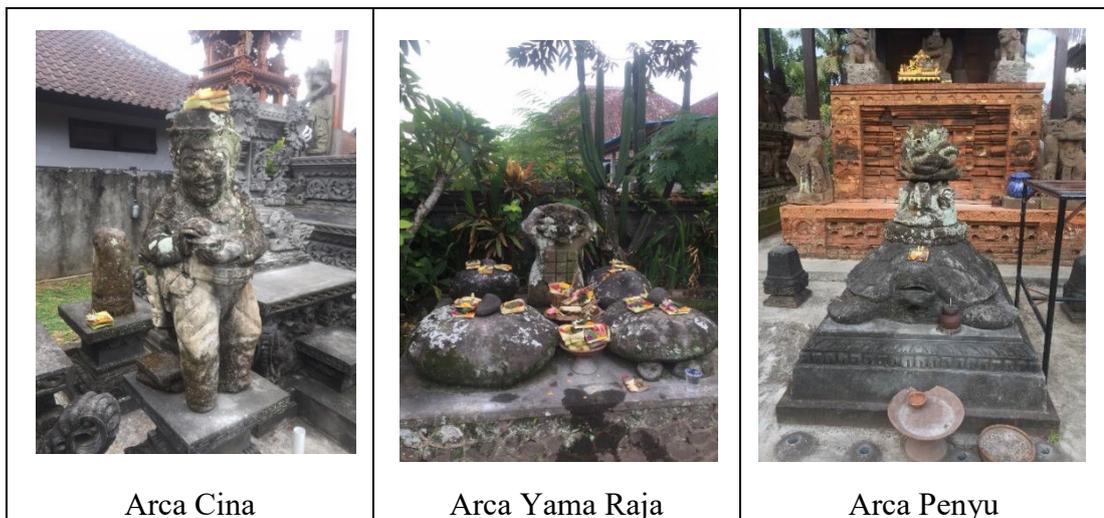


Gambar 4.6
Merajan Penyepian

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2019)

Merajan Penyepian memiliki fungsi sebagai tempat untuk permintaan izin (*matur piuning*) ketika akan mengadakan upacara keagamaan.

- Arca di Puri Gede Kaba-Kaba





Gambar 4.7

Arca dan Patung Puri Gede Kaba-Kaba

Sumber: Dokumentas Pribadi (2019)

Puri Kaba-Kaba memiliki beberapa arca yang seperti Arca Cina, Arca Yama Raja, Arca Penyu, Arca Gambuh, Arca Ratu Megelut dan Arca Melalung. Arca Cina merupakan sebuah arca yang dilambangkan seperti seseorang yang berwajah Cina yang sedang membawa uang. Arca Cina ini berada di area Gedong Penyimpanan di Saren Tengah. Arca Yama Raja merupakan sebuah arca yang difungsikan sebagai penjaga keselamatan masyarakat yang berada di Desa Kaba-Kaba. Arca Penyu merupakan sebuah arca yang difungsikan sebagai hiasan yang berada di halaman Merajan Kaleran. Arca Gambuh merupakan perlambangan dari Dewa Kesenian. Arca Ratu Megelut melambangkan kesuburan. Arca *Melalung* merupakan arca yang difungsikan sebagai penjaga luar diripada Puri Gede Kaba-Kaba. Arca *Melalung* difungsikan untuk penjaga di luar daripada Puri Gede Kaba-Kaba. Arca penjaga ini digambarkan vulgar dimaksudkan untuk menolak bala atau menjauhkan roh-roh jahat yang akan mengganggu manusia yang akan melakukan pemujaan.

4) Candi Ratu Miu



Gambar 4.8

Canti Ratu Mi

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2019)

Candi Ratu Miu ini dibuat sebagai bentuk kelaliman seorang raja dimana Raja Anak Agung Ngurah Gede memiliki adik yang dicintai oleh rakyat dan diberi julukan “pengangon”. Monumen ini merupakan monumen kelaliman raja yang keberadaannya ada sampai saat sekarang ini termasuk juga patung anjing dari adik raja tersebut.

Kesenian Gambuh di Puri Kaba-kaba

Kesenian Gambuh adalah tarian drama tari Bali yang dianggap paling tinggi mutunya dan juga merupakan drama tari klasik Bali yang paling kaya akan gerak-gerak tari, sehingga dianggap sebagai sumber segala jenis tari klasik Bali.

Di Puri Kaba-kaba sendiri kesenian gambuh sudah tidak ada lagi yang memainkan, tapi masyarakat di desa

Kaba-Kaba banyak memainkan senin gambuh ini.



Gambar.5.27. Kesenian Gambuh di Puri Kaba-Kaba

B. Kearifan lokal di Puri Kaba-Kaba

1) Nangluk Merana

Upacara Nangluk Mrana (merana) adalah upacara yadnya yang dilaksanakan sebagai permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi) agar berkenan menangkal atau mengendalikan gangguan-gangguan yang dapat membawa kehancuran atau penyakit pada tanaman, seperti padi di sawah, hewan maupun manusia sehingga tidak membahayakan. Asal kata "Nangluk Mrana" berasal dari kata bahasa Bali yang kemungkinan juga mendapat pengaruh bahasa sansekerta. “Nangluk” berarti empangan, tanggul, pagar, atau penghalang; dan “mrana” berarti hama atau bala penyakit. Mrana adalah istilah yang umum dipakai untuk menyebut jenis-jenis penyakit yang merusak tanaman. Bentuknya bisa berupa serangga, binatang maupun dalam bentuk gangguan keseimbangan kosmis yang berdampak merusak tanaman. Nangluk Mrana berarti mencegah atau menghalangi hama (penyakit), atau ritual penolak bala. Upacara Nangluk Mrana menjadi tradisi penting yang dilakukan oleh krama subak untuk menolak hamayang ada di sawah.

2) Atraksi alam

Desa Kaba-Kaba juga memiliki potensi alam berupa persawahan, hutan bambu, perkebunan kelapa, pisang, bunga jepun, dan pada beberapa banjar di Desa Kaba-Kaba juga terdapat palawija. Selain itu terdapat juga mata air Pancoran Pamaron dan air dari pancoran ini sering digunakan masyarakat lokal sebagai air minum untuk kebutuhan sehari-hari.



Gambar 4.9

Mata Air Pancoran Pamaron

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2019)

Dengan adanya kegiatan wisata bersepeda ini juga dapat melestarikan lingkungan dan menjaga potensi-potensi alam yang ada di Desa Kaba-Kaba agar tetap asri, dengan begitu wisatawan yang mengikuti kegiatan tour bersepeda ini diharapkan akan merasa ingin kembali lagi ke Desa Kaba-Kaba karena suasananya yang masih asri.

C. Evaluasi Pengelolaan Desa Wisata Kaba-Kaba

Desa Wisata Kaba-Kaba sejak ditetapkan menjadi Desa Wisata diserahkan pengelolaannya kepada Kelompok Sadar Wisata. Evaluasi dilihat dari :

1) Perencanaan

Pengelola Desa Wisata belum pernah memiliki perencanaan-perencanaan yang jelas dan teradministrasikan dengan baik. Perencanaan hanya lisan dan wacana belum ada Program kerja secara jelas. Kelompok Sadar wisata belum tahu akan berbuat apa dalam pengembangan desa desa wisata kaba-kaba.

2) Pengorganisasian

Dengan ditetapkan Desa Kaba-Kaba menjadi desa wisata maka telah dibentuk Kelompok Sadar Wisata. Penyusunan organisasi dilakukan dengan sistem penunjukan, dalam perjalanannya sebagian besar personil yang telah ditetapkan tidak dapat aktif karena mereka memiliki pekerjaan masing-masing sebagai karyawan swasta, pegawai negeri, guru dan lain-lain. dengan demikian hanya Ketua saja yang aktif sendiri.

3) Pengarahan dan Pengawasan dalam Aktivitas Organisasi.

Sejak Kelompok sadar wisata dibentuk seluruh aktivitas hanya dioperasikan sendiri oleh Ketua Kelompok karena anggota yang lainnya tidak pernah aktif. Ketua Kelompok telah melakukan kerjasama dengan travel agent yang menjual paket

bersepeda. Dalam Paket bersepeda dibuat beberapa kegiatan seperti kunjungan ke Puri Gede Kaba-Kaba, menikmati alam desa, melihat anak-anak menari disanggar tari yang ada di lingkungan Puri.

D. Kendala Pengelolaan Desa Wisata Kaba-kaba

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua kelompok Sadar Wisata dan Kepala Desa Kaba-Kaba bahwa hal yang menjadi permasalahan adalah kurangnya personil yang bisa terlibat secara penuh dalam

E. Kategori Desa Wisata Kaba-Kaba

Pengkategorian Desa Wisata Kaba-Kaba dibuat berdasarkan Kategori yang dikeluarkan oleh Dirjen Kelembagaan dan Kerjasama Kementerian Pariwisata. Adapun hasil check list yang diisi oleh Ketua Pokdarwis bersama Peneliti sekaligus penilai sebagai berikut

Tabel 2.1 Klasifikasi Desa Wisata

| NO | KRETERIA | SUB KRETERIA | KLASIFIKASI DESA WISATA | | | |
|----|--|---|-------------------------|---|---|---|
| | | | A | B | C | D |
| 1 | Kepemilikan dan K epengurusan Oleh Masyarakat | Terdapat pengelolaan yang efektif dan transparan | √ | √ | √ | √ |
| | | Legalitas lembaga atau kelompok desa | √ | √ | √ | √ |
| | | Memiliki pengelolaan yang efektif dan transparan | - | - | - | √ |
| | | Memiliki kemitraan yang efektif | √ | √ | √ | √ |
| 2 | Kontribusi Terhadap Kesejahteraan Sosial | Menjaga martabat manusia | √ | √ | √ | √ |
| | | Pembagian biaya dan keuntungan yang adil | - | √ | √ | √ |
| | | Memiliki jaringan ke ekonomi lokal dan regional | - | - | √ | √ |
| | | Melestarikan dan memperkaya tradisi dan budaya setempat | √ | √ | √ | √ |
| 3 | Kontribusi Untuk Menjaga dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan | Melestarikan SDA | √ | √ | √ | √ |
| | | Aktivitas konservasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan | - | √ | √ | √ |
| 4 | Mendorong Terjadinya Partisipasi Interaktif Antara Masyarakat Lokal dan Pengunjung (wisatawan) | Terdapat interaksi antara tamu dan masyarakat local | √ | √ | √ | √ |
| | | Keberlanjutan produk pariwisata berbasis masyarakat | √ | √ | √ | √ |

| | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|
| 5 | Jasa Perjalanan Wisata dan Pramuwisata yang Berkualitas | Kualitas keahlian pramuwisata desa wisata | - | - | √ | √ |
| | | Memastikan kualitas perjalanan wisata | - | - | - | √ |
| 6 | Kualitas Makanan dan Minuman | Kualitas pelayanan makanan dan minuman | √ | √ | √ | √ |
| | | Memastikan makanan dan minuman yang berkualitas | √ | √ | √ | √ |
| 7 | Kualitas Akomodasi (homestay) | Kualitas layanan akomodasi | - | √ | √ | √ |
| | | Memastikan pengelolaan akomodasi yang berkualitas | - | - | √ | √ |
| 8 | Kinerja Friendly Tour Operator | Komitmen pada nilai-nilai ideal desa wisata | √ | √ | √ | √ |
| | | Komitmen pada nilai-nilai ideal desa wisata | - | √ | √ | √ |
| | | Kontribusi terhadap perlindungan masyarakat dan alam | - | - | √ | √ |
| | | Dukungan terhadap ekonomi local | √ | √ | √ | √ |
| | | Mempromosikan pengalaman yang memuaskan dan aman bagi wisatawan dan masyarakat | √ | √ | √ | √ |

Berdasarkan Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa desa wisata Kaba-Kaba adalah desa wisata dengan Kata gori berkembang. dengan indikator

1. Kepemilikan dan Kepengurusan Oleh Masyarakat :Sudah dibentuk kelompok Pengelola Desa wisata berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kaba akan tetapi belum efektif,telah memiliki kemitraan internal : dengan Keluarga Puri Kaba-Kaba, Kelompok PKK dan Kemitraan external dengan usaha jasa wisata yaitu
2. Kontribusi busi terhadap kesejahteraan sosial :
3. Kontribusi Untuk Menjaga dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan
4. Mendorong Terjadinya Partisipasi Interaktif Antara Masyarakat Lokal dan Pengunjung (wisatawan)
5. Jasa Perjalanan Wisata dan Pramuwisata yang Berkualitas
6. Kualitas Makanan dan Minuman
7. Kualitas Akomodasi (homestay)
8. Kinerja Friendly Tour Operator

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Desa Wisata Kaba-Kaba memiliki potensi daya tarik wisata alam dan sosial budaya yang cukup memadai sebagai bagian produk desa wisata
- b) Faktor penghambat pengembangan desa wisata kaba-kaba bersumber lebih besar dari faktor internal yaitu kemampuan dan komitmen dari sumber daya manusianya
- c) Desa wisata kaba-kaba dalam pengembangannya dikategorikan sebagai desa wisata sedang berkembang

B. Saran

- a) Kepada seluruh pemangku kepentingan pengembangan Desa wisata Kaba-Kaba agar segera melakukan konsolidasi, untuk menata ulang atau penguatan kelembagaan pengelola desa wisata
- b) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mendukung pengembangan desa wisata
- c) Agar Pemerintah desa dapat mengalokasikan dana melalui APBDes sehingga Kelompok Sadar Wisata memiliki dana operasional untuk melakukan aktifitasnya
- d) Agar segera dilakukan pelatihan pemandu wisata, pelatihan bahasa Inggris, pelatihan memasak dan penyajian makanan dan minuman
- e) Agar dibuat perencanaan terutama dalam perencanaan produk, promosi, pengembangan sumber daya manusia, monitoring dan evaluasi
- f) Agar pengelola desa wisata dapat melakukan kerja sama yang lebih banyak dengan perusahaan jasa wisata
- g) Agar instansi Pemerintah terkait terutama Dinas Pariwisata dan stake holder lainnya dapat melakukan pembinaan, pendampingan dalam pengembangan desa wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Baksh, R.dkk. 2012. "Community Participation in the Development of Ecotourism: A Case Study in Tambaksari Village, EastJava Indonesia". *Journal of Basic and Applied Scientific Research*, Vol. 2; No.12; pp.12432-12437.
- Brunner, Edward. 2010. *New Paradigm of Tourism: A Review of the Literature from 2005 to 2009*, Scientific Research In Tourism
- Joko Utomo, Slamet., dkk . 2017. "Strategi Pengembangan desa wisata di Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang", *Jurnal Neo-Bis*, Volume 11, No.2, Desember 2017, pp. 142-153.
- Miles, Matthew B. Dan Michael A. Huberman.1992.*Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UII Press.
- Nalayani, Ayu Hari. 2016, "Evaluasi dan Strategi Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Badung," *Jurnal Jumpa* Volume 02 nomer 02 Januari 2016

- Nashuilia, AP. 2015. Desa Pintar. <http://azzradesapintar.blogspot.co.id/>. Diakses tanggal 8 Maret 2017.
- Nuryanti, W. 1993. Concep, Perspective and challenges, makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pantiyasa, I W. 2019, *Model Pengelolaan Desa Wisata*, Denpasar, STPBI Press
- Pantiyasa, I W 2013, *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta, Andi Press
- Putra, I Nyoman Darma dan I Gde Pitana. 2010. *Pariwisata Pro- Rakyat Meretas Jalan Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Priasukmana, S & R.M. Mulyadi. 2001. Pembangunan Desa Wisata: Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah. *Info Sosial Ekonomi*. 2 (1): 37-44.
- Rahayu, W.P. dkk. 2003. *Klasifikasi Bahan Pangan dan Resiko Keamanannya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sanjaya, Rindo Bagus. 2018. "Strategi Pengembangan Desa berbasis Masyarakat di Desa Kementul Kabupaten Semarang," *Jurnal Jumpa* Volume 05 nomer 01 Juli 2018p
- Shodiq, J. 2009. "Perencanaan Kampung Berbasis Lingkungan (*Ecovillage*) di Kawasan Penyangga Taman Nasional Ujung Kulon Banten." *Skripsi*. Program Studi Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Suansri, Potjana. 2003. *Community Based Tourism Hand Book*. Thailand: Rest Project Word Tourism Organization 1999.
- Sunaryo, B. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Yohana, Sylvi Putri Ayu. 2018, *Membangun Indonesia dari Pinggiran Smart Village*, Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Deputi Bidang Kajian Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara.